

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Rozi ^{1*}, Maulana ², Alamsyah ³

^{1,2,3} Universitas Tamansiswa (UNITAS) Palembang, Indonesia

rozzii8@gmail.com ^{1*}, maulana@unitaspalembang.ac.id ², alamsyah@unitaspalembang.ac.id ³

Alamat: Jl. Taman Siswa No.500, Kepandean Baru, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114

Korespondensi email: rozzii8@gmail.com

Abstract. *Rozi. This study aims to describe the role of village-owned enterprises in developing small businesses in Pelajau Village, Banyuasin III District, Banyuasin Regency. This research was conducted for three months using a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques were carried out by presenting data, reducing data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the establishment of a Village-Owned Enterprise has the aim of improving the village economy, optimizing village assets so that they are useful for village welfare, increasing community efforts in managing the village's economic potential through SMEs. In this case Pelajau Village Owned Enterprises have human resources that are quite good and facilities that are quite supportive, it's just how the implementation process will determine the success of each program to be implemented. With the existence of sufficient human resources and supported by village facilities and infrastructure, it is expected to be able to explore the economic potential of pelajau villages through BUMDes. With the commitment and quality of BUMDes management in collaboration with the community, of course, the hope to build the needed job opportunities will be realized through the development of village potential and creative economic activities in Pelajau Village. The implementation of the Village-Owned Enterprise program also involves other parties, namely other community institutions, especially those in Pelajau Village and organizations that are included in the activities of Village-Owned Enterprises and the community in general.*

Keywords: BUMDes, UKM, Local Economic Development

Abstrak. *Rozi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMN dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menyajikan data, mereduksi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa melalui UKM. Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Pelajau memiliki sumber daya manusia yang cukup baik dan fasilitas yang cukup mendukung, hanya bagaimana proses implementasi akan menentukan keberhasilan setiap program yang akan diimplementasikan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dan didukung sarana dan prasarana desa, diharapkan dapat menggali potensi ekonomi desa pelajau melalui BUMDes. Dengan komitmen dan kualitas pengelolaan BUMDes yang berkolaborasi dengan masyarakat, tentunya harapan untuk membangun lapangan kerja yang dibutuhkan akan terwujud melalui pengembangan potensi desa dan kegiatan ekonomi kreatif di Desa Pelajau. Pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa juga melibatkan pihak lain, yaitu lembaga masyarakat lainnya, khususnya yang ada di Desa Pelajau dan organisasi yang termasuk dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat pada umumnya.*

Keywords: BUMDes, UKM, Pengembangan Ekonomi Lokal

1. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi daerah pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966. Era otonomi ini mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk bersaing dalam meningkatkan

kualitas dan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, setiap daerah memiliki peluang besar untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada, demi mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, daerah harus mengatur strategi yang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mencakup perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah agar semua program dan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek-aspek penting seperti ekonomi, sosial, dan politik, sehingga setiap langkah yang diambil dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan strategi yang tepat, daerah tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan politik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan daerah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Pemerintah Desa (Pemdes) telah membangun gedung khusus untuk produksi makanan olahan berbahan lokal. Beberapa produk yang akan dihasilkan antara lain olahan dari ganyong atau ubi laos, kue basah, kue kering, dan keripik.

Pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemdes untuk memberdayakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dengan adanya tempat produksi ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pemasaran produk makanan, sehingga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Dengan mengolah bahan-bahan lokal menjadi produk yang bernilai tambah, diharapkan Desa Pelajau dapat menjadi contoh dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pelajau masih belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Hal ini tentunya menghambat perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa tersebut. Meskipun BUMDes diharapkan dapat membangkitkan perekonomian lokal melalui

program-program yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh sejauh ini belum menunjukkan dampak yang signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes dan programnya tidak hanya berasal dari kelemahan internal lembaga itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal. Misalnya, kurangnya dukungan dari masyarakat, tantangan dalam pemasaran produk, dan minimnya keterampilan serta pengetahuan dalam mengelola usaha. Semua faktor ini berkontribusi pada keterbatasan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pelajau.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan BUMDes serta peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat lebih efektif dalam memberdayakan UKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pelajau.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan Usaha Kecil di Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana BUMDes dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UKM.

Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh BUMDes serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menggali perspektif masyarakat, pengelola BUMDes, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas BUMDes dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan BUMDes, sehingga dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UKM di Desa Pelajau.

2. LANDASAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, yang dibentuk melalui partisipasi masyarakat dengan prinsip kemandirian. Dalam konteks ini, BUMDes berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan memberdayakan potensi lokal. Sumber modal untuk

BUMDes umumnya berasal dari masyarakat itu sendiri, meskipun BUMDes juga dapat mengajukan pinjaman kepada pihak luar, termasuk pemerintah desa atau lembaga keuangan lainnya.

Keberadaan BUMDes diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Dengan prinsip mandiri dan partisipatif, BUMDes memiliki peluang untuk berinovasi dalam pengelolaan usahanya. Oleh karena itu, peran BUMDes sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa, menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pembangunan desa secara keseluruhan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola secara kolaboratif oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang ada, sehingga dapat lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDes berbeda dari lembaga ekonomi pada umumnya, karena tujuan utamanya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan menciptakan nilai sosial. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan warga desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Hal ini juga penting untuk mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalistik yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang kental di pedesaan.

Dalam praktiknya, BUMDes harus mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif, serta berinovasi dalam menyediakan layanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang didirikan atas inisiatif masyarakat dengan prinsip mandiri. Modal untuk operasional BUMDes umumnya berasal dari masyarakat desa itu sendiri, yang mencerminkan partisipasi aktif warga dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun, BUMDes juga memiliki fleksibilitas untuk mengajukan pinjaman modal dari pihak luar, termasuk pemerintah desa atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 213 ayat 3, yang memberikan landasan hukum bagi BUMDes untuk mendapatkan sumber modal tambahan. Penjelasan mengenai sumber modal ini sangat penting dalam persiapan pendirian BUMDes, karena berkaitan erat dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes).

Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan transparan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Pendekatan yang mengutamakan kemandirian dan partisipasi masyarakat ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kategori usaha yang penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Kriteria utama untuk kategori ini adalah bahwa kekayaan bersih yang dimiliki tidak melebihi Rp 500.000.000, eksklusif dari tanah dan bangunan tempat usaha.

UKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, UKM juga berfungsi sebagai wahana bagi masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi, memperkuat jaringan sosial, serta mendukung keberlanjutan ekonomi di tingkat desa maupun kota. Dengan karakteristik yang unik, UKM diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Usaha Kecil, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, memiliki kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi usaha yang termasuk dalam kategori ini. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi salah satu dari dua kriteria utama: pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

Selain itu, Usaha Kecil juga dapat mengajukan kredit dari bank dengan batasan maksimal, yaitu antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kriteria-kriteria ini penting untuk mendukung perkembangan dan aksesibilitas finansial bagi usaha kecil, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut moleong (2002;6), jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah realitas persoalan berdasarkan pada pengungkapan fakta/ hal yang telah diungkapkan oleh data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan berupa tulisan-tulisan, kata-kata dan gambar-gambar bukan yang berupa angka. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian dilakukan pengamatan secara sistematis dengan disertai pencatatan yang berati. Peneliti mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan sumber informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah informan. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan objektif peneliti biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke beberapa informan.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya. Melalui dokumentasi ini peneliti akan mengelompokkan atau mengklasifikasikannya sesuai dengan tujuan penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap dokumen.

4. HASIL PENELITIAN

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan mengenai Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat mengembangkan rencana kerja sama dengan usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum. Dengan demikian, BUMDes berperan penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibentuk untuk memenuhi berbagai visi yang berorientasi pada kepentingan manusia. Dalam pelaksanaan misinya, organisasi dikelola dan diurus oleh manusia, menjadikannya sebagai faktor strategis dalam semua kegiatan institusi.

Anggota sebagai sumber daya utama BUMDes dituntut untuk memberikan kemampuan terbaik kepada masyarakat dan menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga masyarakat merasa terlayani dan terbantu dengan baik serta puas. SDM memiliki fungsi mengelola input yang dimiliki lembaga pemerintah, khususnya BUMDes, secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Di BUMDes Pelajau, meskipun terdapat sumber daya manusia yang sudah cukup baik dan fasilitas yang memadai, keberhasilan setiap program yang akan dilaksanakan tetap bergantung pada proses pelaksanaannya. Dengan adanya sumber daya manusia yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana desa, diharapkan BUMDes dapat menggali potensi ekonomi Desa Pelajau secara optimal.

Menciptakan Lapangan Kerja

Menciptakan lapangan kerja adalah upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta peningkatan kreativitas berwirausaha di kalangan masyarakat desa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 3,55% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,45%. Sementara itu, TPT di perkotaan menurun 0,15% menjadi 6,15%. Jika dibandingkan dengan Februari 2018, baik di perkotaan maupun perdesaan, terjadi penurunan. Secara umum, TPT pada Februari 2020 menurun 0,02% dari 5,01% pada Februari 2019 menjadi 4,99%. Namun, jumlah pengangguran meningkat dari 6,82 juta menjadi 6,88 juta seiring dengan peningkatan angkatan kerja dari 136,18 juta menjadi 137,91 juta.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia cenderung menurun, tetapi pada Februari 2020, angka pengangguran kembali meningkat menjadi 6,88 juta orang. Angkatan kerja pada 2020 juga bertambah menjadi 137,91 juta, dengan 131,03 juta di antaranya bekerja. Penurunan lapangan pekerjaan sebagian besar berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya komitmen dan kualitas pengurus BUMDes yang bekerja sama dengan masyarakat, harapan untuk membangun lapangan kerja yang dibutuhkan tidak akan terwujud.

Meningkatkan Peranan Masyarakat Desa

Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta sumber lain yang sah, sangat penting. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Pelaksana Operasional maksimal terdiri atas tiga Kepala Seksi (Kasi), yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Organisasi pengelola yang mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi yang berbeda dari Pemerintah Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BUMDes, pihak lain juga dilibatkan, termasuk lembaga masyarakat lainnya, terutama yang ada di Desa Pelajau. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, kerjasama ini juga memperkuat sinergi antara BUMDes dan lembaga-lembaga lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Faktor pendukung dan penghambat

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat selalu mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah desa. Namun, mereka menyayangkan ketika program tersebut tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak disosialisasikan secara efektif. Akibatnya, masyarakat terkadang tidak mengetahui program-program yang telah dibuat oleh pemerintah desa.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial masyarakat Desa Pelajau juga mendukung jalannya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yang terpenting, lembaga-lembaga desa sangat mendukung dan membantu setiap program yang dijalankan oleh BUMDes. Dukungan ini penting untuk memastikan keberhasilan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa

Faktor Penghambat

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa

Menurut tokoh masyarakat Pelajau, kurang maksimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih sempitnya pola pikir masyarakat. Hal ini menghambat partisipasi dan pemanfaatan potensi yang ada di desa. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan membuka wawasan masyarakat agar mereka lebih aktif dalam mendukung dan mengembangkan BUMDes. Pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan bisa menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

b. Belum adanya Investor yang mau membantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat sebagian masyarakat untuk mengikuti program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai BUMDes juga memengaruhi implementasi kebijakan yang dirasa kurang maksimal. Kondisi infrastruktur, seperti jalan yang buruk, turut memberikan pengaruh terhadap kesulitan dalam mendapatkan modal dari pengembang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat serta memperbaiki infrastruktur yang ada agar program BUMDes dapat berjalan dengan lebih baik.

5. KESIMPULAN

BUMDes di Desa Pelajau memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa, dengan fokus pada pengelolaan aset desa dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menggali potensi ekonomi yang ada. Dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, BUMDes diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Meskipun masyarakat mendukung program-program yang diusulkan, terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya minat dan pemahaman masyarakat mengenai BUMDes, serta infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada komitmen pengurus dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta dukungan dari lembaga-lembaga local.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus dan Agus/2015/ JurnalAdm. Publik, Volume 5 No. 2 Tahun. 2015. Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- B. N, Marbun, 2009. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum (Jakarta: Pustaka Swara,
- Chambers, Robert. 2004. Participatory Rural Appraisal (PRA): Memahami Desa Secara Partisipatif. Oxfam: Yayasan Mitra Tani.
- Ife, Jim. 2008. Community Deveploment: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasmita, Ginanjar. 2006. Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
- Komang Sahita Utam, dkk, Jurnal Pendidikan Ekonomi e-ISSN : 2599 - 1426 Volume 11 No. 2 Tahun 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui Kewirausahaan sosial
- Koswara, S. 2008. Teknologi Pengolahan Singkong. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ludigdo, U. 2006. Jurnal. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik. SNA IX. UNBRA. Padang:22 Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Maria Rosa /2016/Jurnal, MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta

- Pambudi S, Himawan dkk., 2003, Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Lappera, Yogyakarta
- Papilaya, Eddy Ch. 2001. Wacana Pembangunan Alternative. Yogyakarta: Sr- Ruzz Madia.
- Peraturan Pemerintah PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Romi Saputra /2019/Jurnal IPDN. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
- Rukminto, Isbandi. 2008. Perencanaan Partisi Patoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: Gudang Ilmu
- Subejo. 2013. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Bunga Rampai. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Jakarta: Alfabeta.
- Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Sumodiningrat Gunawan. 2009. Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta) Pustaka Pelajar
- Suparjan dan Suryatno, Hempri. 2003. Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suparjan. 2003. Perkembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supriatna, Nana, dkk. 2007. Pendidikan IPS Di SD. Bandung: UPI Press. Sutrisno, H.MM 2007. Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Yogyakarta : United Nations Secretariat. United Nations 2008. Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. New York: United Nations Secretariat
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undnag Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wasistiono, Sadu. 2006. Kapita Selekt Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint.
- Zuriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.